

**DIMENSI PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (1)**

Suatu pemerintahan yang efektif hanya dapat bekerja dalam lingkungan politik yang sehat, sehingga dapat menyusun agenda pembangunan jangka panjang yang komprehensif bagi kepentingan bangsa dan generasi yang akan datang, diantaranya membuat kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu secara optimal membuka kesempatan kerja, memberikan investasi yang besar di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang konsisten.



**DR. IR. RATU MUTIALELA
CAROEBOKA, M.S**

Keberanian dan kreativitas suatu pemerintahan yang efektif dan *legitimate* menghantarkan rakyatnya ke dalam kompetisi global dengan menciptakan keunggulan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Pemerintahan yang baik dan benar akan terus memperkuat legalitasnya dengan memberikan inspirasi kepada rakyat, tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberikan pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik-konflik kepentingan yang besar serta memberikan arahan tentang cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya cita-cita masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin dalam suasana damai, demokratis, aman dan tenteram, dengan demikian pemerintah merupakan "a word of solution" dan bukan "a source of problem" bagi rakyatnya.

Para elit pemerintahan ditantang untuk memiliki kemampuan dan melakukan pe-

nyelesaian dengan cermat, tepat atas segala permasalahan yang dihadapi dan bukan hanya sekedar mendeskripsikan masalah atau memberikan komentar se-penggal-sepenggal yang dapat menimbulkan kebingungan rakyat ser-

ta menciptakan masalah baru. Kemampuan para aparaturnegara perlu dikembangkan kemampuannya dalam menganalisa permasalahan atau menentukan strategi yang menjamin terpeliharanya kepentingan nasional Indonesia dalam kompetisi global. Pemahaman dan pendalaman terhadap isu lokal, regional nasional, dan global, harus mampu diserap dan dicermati sebagai suatu paham analisa dalam menentukan strategi pembangunan.

Sebagai permasalahannya dalam hal ini adalah, untuk mencapai keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia tersebut, dimensi apakah yang diperlukan agar tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud?

Pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik atas dasar keutuhan Negara kesatuan, maka otonomi daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2001, merupakan salah satu jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan, yaitu menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekon-sentrasi. **(bersambung)**

**DIMENSI PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (2)**

Pembagian kewenangan (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*) menjadi salah satu motivasi bagi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang lebih konsisten. Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai otonomi daerah adalah merupakan hal yang tidak dapat ditunda dalam pengaturan dan pengelolaan kehidupan sosial, ekonomi dan politik, yang merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah, dan dengan demikian pemerintah pusat dapat berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional yang mendasar serta penentuan strategi untuk kompetisi global.



**DR. IR. RATU MUTIALELA
CAROPEBOKA, M.S**

Pembagian tugas (*division of labor/job description*) yang jelas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, memberikan kejelasan dan dipertanggungjawabkan jika terjadi kegagalan dari suatu kebijakan oleh itu efektifitas adalah merupakan suatu kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan dan tuntutan yang bergulir.

Menurut Burns, John P (1994), efektifitas berkenaan dengan kemampuan menyusun, mengatur, perubahan pembaharuan, penyesuaian organisasi (*effectiveness with regard to the ability of composing, arranging change and renewal, as well as organizational adjustments*) Suatu pemerintahan tanpa akuntabilitas merupakan beban yang berat bagi rakyatnya, rakyat me-

merlukan suatu kepemimpinan yang mampu melihat secara tepat peluang dan tantangan yang tersedia di balik perubahan global, sehingga berani mengambil langkah yang konstruktif dalam menyingkirkan kelompok yang menentingkannya sendiri (*vested interest*) dan melakukan reformasi dalam struktur, *responsive* pada kenyataan dan tantangan abad 21 ini. Suatu pemerintahan tanpa visi masa depan yang jelas akan cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif.

Seperti yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia kini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, bahwa perlu dilakukan Revolusi mental. Berdasarkan program demikian tentu banyak kebijakan-kebijakan yang revolusioner akan mengawatirkan kelompok-kelompok *vested interest*, karena kelompok ini lebih sering membekukan, menyimpan persoalan daripada memecahkan dan menyelesaikan masalah fundamental dalam kehidupan suatu bangsa, baik yang laten maupun yang muncul tiba-tiba. Suatu pemerintahan yang efektif dan efisien harus mengedepankan tiga (3) dimensi pemerintahan yaitu ; dimensi administrasi, dimensi hukum dan dimensi politik, antara tiga dimensi tersebut mempunyai korelasi yang sangat erat dalam menjadikan pemerintah yang efektif dan efisien serta bermanfaat bagi rakyat. **(bersambung)**

DIMENSI PEMBANGUNAN Pemerintahan Republik Indonesia (3)

(1) Dimensi administrasi, pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi dikenal dengan istilah reformasi administrasi, diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk menerapkan peraturan baru terhadap sistem administrasi untuk meng-



DR. IR. RATU MUTIALELA
CAROPEBOKA, M.S

ubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Pada era pembangunan lima tahunan (REPELITA), arah dari pembangunan aparatur dan administrasi di Indonesia dinyatakan dalam GBHM, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan keseluruhan sistem administrasi Negara dengan tujuan agar sistem administrasi negara andal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dari dinamika lingkungan strategis. Pada masa kini untuk mencapai tujuan dimaksud yang harus dilakukan adalah menetapkan sasaran utamaya yaitu: pembenahan birokrasi yang mekanistik, bersih dan berwibawa, dan untuk pencapaian sasaran tersebut juga diperlukan penataan kelembagaan, personalia, sistem dan prosedur, dengan perencanaan dan control yang dibenahi untuk menegakkan disiplin dan ketaatan hukum, disamping itu partisipasi masyarakat sebagai civil control sangat diperlukan.

(2) Dimensi Hukum, suatu pemerintahan memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua pihak, bahwa ada aturan main yang perlu ditaati dan pelanggaran atasnya akan dihadapkan kepada sanksi-

sanksi tertentu, dalam semua ruang interaksi kehidupan sosial ekonomi dan politik. Negara dan pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah sistem hukum (*legal system*). Oleh karena itu kepada setiap orang, rakyat Indonesia tersedia

aturan yang memberi arahan yang jelas tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan, kepastian hukum ini menjadi peranan yang sangat menentukan dan penting ketika bangsa ini memasuki era perdagangan bebas. Hal ini penting dan sangat diperlukan baik oleh pelaku ekonomi domestik maupun internasional, mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Sering terjadi dimana antara undang-undang dan peraturan ketika pelaksanaan di lapangan pada kenyataannya terjadi perlakuan yang berbeda. Untuk itulah diperlukan pengawasan guna menjamin konsistensi pelaksanaan penetapan undang-undang dan peraturan di lapangan.

Pembenahan birokrasi, pemberdayaan sumber daya manusia, aparatur, kelembagaan; pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan serta pengawasan hukum, disiplin dan taat hukum perlu dilakukan dan ditertibkan, sehingga rakyat, masyarakat menaruh kepercayaan terhadap pelaksanaan pembangunan, yang dalam hal ini juga tidak terlepas dari pengawasan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan berbagai pengawas fungsional lainnya. (bersambung)

**DIMENSI PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (4)**

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat ditegakkan dan terwujud jika pemerintahan memberikan jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan di dahulukan, dan hal tersebut yang akan menggugah rasa kepedulian, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan di daerahnya.



**DR. IR. RATU MUTIALELA
CAROEBOKA, M.S**

Dosen Fakultas
Ilmu Komunikasi
Universitas Bina Darma

dalam mencari solusi dengan cara-cara yang baru, efektif atas konflik kepentingan dan permasalahan.

Revel dan Geoff Mulgan (1993) berpendapat bahwa penyebab kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa pertama-tama dapat dilihat dari sistem politik

yang berlaku pada bangsa tersebut. Penulis berpendapat diantara faktor yang dapat menghambat implementasi program pemerintahan diantaranya berupa hambatan politik yaitu perbenturan kepentingan antara pemimpin politik dan pelaksana administrasi, perbedaan prioritas dan parameter antara kepentingan politik dan administrasi atau antara legislatif dan eksekutif sering menimbulkan konflik dalam perancangan dan pelaksanaan suatu program, dan hal tersebut yang menimbulkan keterhambatan laju pembangunan.

Memasuki era pasar bebas, administrasi yang baik, organisasi yang efisien serta aparatur yang kompeten, jujur sangat menentukan dan harus terus dibangun.

Administrasi yang melayani, memberdayakan dan membangun berdasarkan semangat kemitra sejajaran (*entrepreneurship*) dari para pelakunya harus dibina secara kesinambungan, ini diperlukan struktur organisasi yang efisien, kompetitif dan luwes. **(bersambung)**

(3) Dimensi politik: Pemerintahan mengacu pada landasan pokok bagi adanya pemerintahan itu sendiri atau legitimasi, dalam hal ini berlaku asumsi bahwa keabsahan suatu pemerintahan ditentukan oleh tingkat penerimaan (*acceptability*), dimana pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan akomodatif terhadap kelompok minoritas dalam menjamin kesamaan hak serta kewajiban yang harus diperlakukan adil. Kepentingan mereka harus diakomodasi dalam pengambilan keputusan serta dihormati hak-hak fundamentalnya.

Kesalahan kebijakan dan perlakuan diskriminatif yang terencana oleh suatu otoritas yang melingkupi kehidupan mereka, akan melahirkan sikap frustrasi yang dapat menimbulkan anarkhis dan dapat menjurus kepada des-integrasi bangsa. Politik adalah merupakan faktor strategis yang dapat mengharmoniskan berbagai kepentingan, karena ia berada di garis depan

**DIMENSI PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (5)**

Pada tingkat pertama pembangunan administrasi pemerintahan harus diartikan sebagai penanaman motivasi pengabdian, karena itu strategi dalam pengembangan sumber daya aparatur pemerintah harus dibenahi. Lima (5) aspek dalam pengembangan sumber daya manusia dalam administrasi pembangunan (1) penerimaan pegawai (2) penggajian pegawai (3) pendidikan dan latihan (4) promosi karir (5) profesionalisme dan etika bekerja.

Konsep ini menurut penulis perlu diperhatikan karena pembenahan aspek penerimaan pegawai diperlukan supaya organisasi pemerintahan mendapatkan sumber daya manusia yang berkeahlian, berkualitas, disesuaikan dan ditempatkan pada posisi yang sesuai (*right man and the right place*), seorang aparatur harus mampu menerjemahkan dan menganalisa strategi pemerintahan, ini dilakukan terutama pada tingkat menengah ke atas karena padanya masalah keputusan strategi dan kebijakan bertumpu, kegagalan kebijakan merupakan tanggung jawab pengambil keputusan.

Profesional dalam administrasi sangat penting karena



**DR. IR. RATU MUTIALELA
CAROPEBOKA, M.S**

Dosen Fakultas
Ilmu Komunikasi
Universitas Bina Darma

na dapat menghindari resiko dari pemerintahan yang kaku, pemisahan dan penggolongan, ini akan mendatangkan ketidak tepatan waktu dan hanya mendapatkan kepuasan sendiri dalam mempertahankan status quo serta resisten terhadap perubahan.

Seorang eksekutif pembangunan harus mempunyai kelebihan dalam pola pikir dan pola tindak, ia harus: (1) Holistik integralistik yaitu sikap dan perilaku yang mempunyai wawasan, pandangan yang luas terhadap, (2) Proaktif dan antisipatif, dimana seorang birokrat bukan sebagai penonton dalam menghadapi perkembangan tetapi mampu melakukan, membangun kerja sama dengan pihak lain, (3) Kreatif dan inovatif yaitu suatu sikap yang mampu menemukan dan melakukan ide-ide baru dalam memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan manajemennya. (4) Moral dan bertanggung jawab, sebagai eksekutif sikap dan perilaku dituntut untuk memberikan contoh dan teladan pada lingkungannya dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan bertanggung jawab. **(bersambung)**